

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Tingkat Kepatuhan penyampaian LHKPN di Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016 mencapai total prosentase sebesar 50,23%. Sedangkan Tahun 2017 mulai menunjukkan kenaikan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di Pemerintah Provinsi Banten, dimana total prosentase sebesar 71,58%, dan pada tahun 2018 – 2019 mengalami kenaikan dalam penyampaian LHKPN mencapai prosentase yang sempurna yaitu 100% dimana seluruh Wajib Laporkan pada Pemerintah Provinsi melaporkan LHKPN kepada KPK. Prosentase tersebut mengalami kenaikan didukung dengan adanya perubahan tata cara pelaporan LHKPN yang semula manual, pada tahun 2016, menjadi elektronik atau dikenal dengan nama e-LHKPN, dimulai pada pertengahan tahun 2017 untuk masa percobaan dan tahun 2018 sudah berjalan menjadi elektronik. Namun berdasarkan penelitian masih dapat ditemukan beberapa permasalahan yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun kesimpulan secara terperinci dapat dikemukakan pada aspek efektivitas pengelolaan dan kepatuhan pelaporan, dimana terdiri dari 3 sub aspek diantaranya adalah Penerapan sistem elektronik laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara, pengelolaan LHKPN di lingkungan

Pemerintah Provinsi Banten, tingkat pelaporan dan kepatuhan e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pada aspek efektifitas pengelolaan dan kepatuhan pelaporan, pelaporan LHKPN dengan menggunakan sistem elektronik sangat mudah diakses dan pelaporan LHKPN menjadi lebih ringkas. Para Penyelenggara Negara tidak perlu lagi mengirimkan surat-surat kepada KPK, tetapi dapat mengisinya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Selain itu dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang akan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Negara, semakin meningkatkan kepatuhan para Penyelenggara Negara dalam melaporkan harta mereka.

## **B. Saran**

Terkait dengan permasalahan yang ada pada penerapan sistem pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dari manual ke elektronik terhadap tingkat kebutuhan lapor LHKPN pada Pemerintah Provinsi Banten, penulis memberikan saran dilihat dari aspek efektifitas pengelolaan dan kepatuhan pelaporan adalah:

- a. Mendorong komitmen Pimpinan Instansi Daerah untuk mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara serta pencantuman sanksi contohnya seperti

penundaan TPP bagi Wajib Laport yang tidak melakukan pelaporan LHKPN sangat membantu peningkatan Kepatuhan pelaporan LHKPN

- b. Koordinasi secara berkala dengan Koordinator LHKPN di level top manajemen dan anggota UPL dalam rangka monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR PUSTAKA

- Blass, T. (1999). The Milgram Paradigm After 35 Years: Some Things We Now Know About Obedience to Authority. *Journal of Applied Social Psychology*. 29,5., 965-978.
- Bungin, Burhan (2003:42). *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, W. John (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Furchan, A. (1992). *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Usaha Nasional.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jogiyanto. (2005). *Pengertian Sistem*. Yogyakarta: Andi.
- Jogiyanto. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Jogiyanto. (2005). *Pengertian Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- KBBI. (2021, 05 29). *Arti Kata Terapan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Retrieved from KBBI Online: <https://kbbi.web.id>
- Korupsi, K. P. (2006). *Pemberdayaan Instrumen Pencegahan Korupsi (Studi tentang Efektivitas Mekanisme Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*. Jakarta: Deput Pencegahan Direktorat Penelitian & Pengembangan.
- Martono, N. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, L. J. (2002: 4-7). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhajir, N. (1999:192). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Negara, D. P. (2018). *Laporan Tahunan KPK*. Jakarta: Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara.

- Enger L. Norman. (2005:3). *Moekijat*. Bandung: Mandar Maju
- Raharjo, S. (2006:85). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rokhmat, S. (2013). *Metode Penelitian*. Surabaya: CV. Jaudar Press, hal. 13.
- Sarman, & Makarao, M. T. (2012:35). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- STIA LAN Jakarta. (2017). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Sarjana Terapan*. Jakarta
- Suardeyasasri. (2009:9). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016:101). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Taylor, S. (2006: 278). *Psikologi Sosial Triwibowo (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Umami, Z. (2010). *Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Kepatuhan terhadap Aturan pada Mahasiswa Penghuni Ma'had al-Aly di UIN Maulana Malik Ibrahim*. Malang: Skripsi. Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Wahyudi K dan Subando Agus M. (2004). *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.